**BAB VI**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan terkait dengan masalah yang penulis angkat yakni *Pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Natsir Di Indonesia (1950-1951)*, sebagai berikut :

1. Pada akhir pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Hatta kondisi perpolitikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Kabinet RIS dibawah pimpinan Hatta harus memecahkan masalah-masalah yang timbul akibat perang kemerdekaan dan masalah-masalah yang dominan dengan kehidupan suatu negara muda. Akibat perang kemerdekaan banyak prasarana yang hancur. Keadaan ekonomi pada umumnya buruk, seperti inflasi dan defisit dalam anggaran belanja. Masalah utama lain terdapat di bidang kepegawaian, baik sipil maupun militer. Setelah perang selesai, jumlah pasukan harus dikurangi karena keuangan negara tidak mendukungnya. Hal ini menimbulkan masalah antara pasukan APRIS dengan pasukan KNIL yang menuntut berdiri sendiri dan tidak mau bekerjasama. Disisi lain, Setelah pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949, usaha-usaha untuk kembali ke NKRI terus bergema di seluruh wilayah Nusantara. Di berbagai daerah timbul gerakan rakyat yang menuntut pembubaran negara bagian dibawah RIS, dan mereka minta untuk kembali kepada NKRI.
2. Proses pengangkatan Mohammad Natsir menjadi perdana menteri berawal dari keberhasilannya mengubah bentuk Negara Indonesia melalui mosi yang ia keluarkan di Parlemen yang dikenal dengan Mosi Integral Natsir. Mosi ini melapangkan jalan bagi peleburan Negara RIS kepada NKRI secara konstitusional. Terbukti dengan satu persatu negara bagian membubarkan diri dan memutuskan bergabung ke dalam NKRI. Atas jasanya tersebut, sehingga Presiden Soekarno memberi kepercayaan terhadap Natsir untuk membentuk kabinet pertama dalam NKRI tahun 1950.
3. Kebijakan politik Mohammad Natsir setelah berhasil membentuk kabinet ialah menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dengan Belanda mengenai status Irian Barat. Berdasarkan keputusan KMB pada masa Kabinet RIS dibawah pimpinan Hatta, Pemerintah Belanda telah mengakui kedaulatan atas Negara RIS kecuali Irian Barat. Sehingga Irian Barat tetap dalam genggaman Belanda dan akan dibicarakan kembali setahun kemudian tepatnya pada masa Kabinet Natsir. Kabinet Natsir telah melakukan beberapa kali perundingan dengan Pemerintah Belanda mengenai Irian Barat, namun hal tersebut tidak berhasil. Selain itu, Kabinet Natsir juga harus memecahkan masalah keamanan dan ketentraman dalam negeri. Dimana setelah kemerdekaan, banyak sukarelawan atau pejuang yang kecewa karena tidak diberikan penghargaan dan pekerjaan yang layak sesuai jasa mereka. Sehingga mereka kemudian melakukan pemberontakan, misalnya pemberontakan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, Amir Fatah di Jawa Tengah, Daud Beureuh di Aceh dan Ibnoe Hadjar di Kalimantan Selatan. Masalah ekonomipun menjadi hal penting yang harus diperbaiki oleh Kabinet Natsir. Paska kemerdekaan, keadaan ekonomi sangat buruk, pendapatan pemerintah masih sangat kurang sehingga terjadi inflasi. Lewat gagasan Sumitro, Menteri Perdagangan pada masa Kabinet Natsir yang mencanangkan Ekonomi Gerakan Benteng, keadaan ekonomi umumnya lebih baik. Kebijakan Gerakan Benteng ini yaitu memberikan modal kepada pengusaha pribumi untuk mengembangkan usahanya. Tujuannya adalah agar mampu bersaing dengan pedagang asing yang ada di Indonesia seperti Cina dan Belanda.
4. Dampak dari kebijakan politik Kabinet Natsir dapat dilihat dari kegagalannya dalam melakukan perundingan dengan Belanda mengenai status Irian Barat. Kegagalan ini menimbulkan kekecewaan dari berbagai pihak, sehingga tanda-tanda jatuhnya kabinet mulai terlihat pada kondisi ini. Kekecewaan masyarakat ditunjukkan dalam bentuk pengajuan mosi tidak percaya dari berbagai daerah. Diantaranya, mosi tidak percaya dari Pemuda Demokrat Indonesia Cabang Sumbawa dan mosi tidak percaya dari Pemuda Demokrat Indonesia Cabang Medan. Masalah keamananpun tidak bisa diatasi, terbukti adanya pemberontakan-pemberontakan dalam negeri akibat ketidak puasan beberapa pihak terhadap kebijakan yang diambil. Misalnya masalah antara TNI dan pasukan gerilyawan yang tidak mau bekerjasama sehingga terjadi bentrokkan. Selain itu, juga terjadi pemberontakan APRA, Andi Azis, RMS dan pemberontakan DI/TII.

Mengenai masalah ekonomi, kebijakan Ekonomi Gerakan Benteng yang dilakukan oleh Kabinet Natsir ternyata juga mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan politik dikalangan para pengusaha yang diberikan modal. Mereka menyalahgunakan modal yang diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi, hal tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara.

1. **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas dengan melihat tentang Pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Natsir di Indonesia, maka penulis membuat beberapa catatan untuk dijadikan sebagai pelajaran mengenai usaha dalam memperjuangkan NKRI yaitu:

1. Bagi masyarakat Indonesia perlu mengetahui dan memahami bagaimana proses kepemimpinan Perdanan Menteri Mohammad Natsir sehingga masyarakat mengetahui bahwa Kabinet Natsir adalah Kabinet Pertama yang berhasil mengubah bentuk Negara Indonesia dari Negara Federal menjadi Negara Kesatuan.
2. Selain dikenal sebagai Perdana Menteri, Mohammad Natsir juga seorang ulama besar dan pemimpin Partai Islam Masyumi. Bagi para peneliti selanjutnya, masih ada hal menarik lainnya yang dapat dikaji seperti pemikirannya mengenai agama Islam.
3. Bagi pemerintah khususnya bidang perpustakaan dan kearsipan untuk lebih menjaga dan memperhatikan berbagai referensi berupa arsip, dokumen-dokumen dan buku-buku terkait sejarah politik agar lebih memudahkan para peneliti dan pembaca dalam mendapatkan imformasi dan mengetahui tentang sejarah politik di Indonesia.